

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH:

NURMALAN HARAHAHAP
157310199

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA
PEKANBARU**

ABSTRAK

**NURMALAN HARAHAP
157310199**

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit* maupun *impact*. Permasalahan yang muncul yakni terjadi penanganan banjir masih belum maksimal di Kota Pekanbaru, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi bencana banjir. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil. Berdasarkan hasil penelitian kinerja BPBD Kota Pekanbaru dinilai belum terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari belum ada pembagian tugas dari masing-masing personil dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pekanbaru, pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat yang belum dilaksanakan, belum adanya pengurangan daerah yang terkena banjir di Kota Pekanbaru, dan belum terbentuk masyarakat yang peduli dengan lingkungan.

Kata Kunci : Kinerja; BPBD; Kota Pekanbaru.

**PERFORMANCE OF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) IN FLOOD DISASTER MANAGEMENT IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

NURMALAN HARAHAHAP
157310199

Organizational performance is the totality of the work achieved by an organization, the achievement of organizational goals means that the performance of the organization can be seen from the degree to which the organization can achieve goals that are based on the goals set previously. Organizational performance is something that has been achieved by the organization within a certain period, both related to the input, output, outcome, benefits and impact. The problem that arises namely the handling of floods is still not optimal in Pekanbaru City, so the purpose of this study is to determine performance Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru city in tackling the flood disaster. This research approach is a qualitative approach with research locations in Pekanbaru City. Types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection is done through observations, interviews and documentation. After the data is obtained and then grouped according to its type, then the data is analyzed and linked with theories in the form of a description so that conclusions can be drawn. Based on the results of performance research BPBD Pekanbaru city considered not done well, this is seen from the lack of division of tasks of each personnel in tackling flood disasters in the city of Pekanbaru, education and training for communities that have not been implemented, there has been no reduction in areas affected by flooding in the city of Pekanbaru, and have not yet formed people who care about the environment.

Keywords: Performance; BPBD; Pekanbaru City.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	16
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	18
2. Konsep Kinerja	21
3. Konsep Organisasi	25
4. Konsep Kinerja Organisasi	26
5. Konsep Bencana	30
6. Konsep Banjir	37
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Berfikir	39
D. Konsep Operasional	40

E. Operasional Variabel.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penentuan Informan.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	47
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.....	49
B. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru	53
C. Struktur Organisasi	57
D. Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan.....	61
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	71
1. Jenis Kelamin Informan	71
2. Tingkat Pendidikan Informan	72
3. Umur Informan.....	73
B. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru.....	74
1. Masukan (<i>Input</i>)	76
2. Keluaran (<i>Output</i>)	81
3. Hasil (<i>Outcome</i>)	86
4. Manfaat (<i>Benefit</i>)	91
5. Dampak (<i>Impact</i>)	95

D. Faktor-Fakto Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru	97
---	----

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	98
B. Saran-sarana	99

DAFTAR KEPUSTAKAAN	100
---------------------------------	-----

DOKUMENTASI PENELITIAN	103
-------------------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	: Data Bencana Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017.....	10
1.2	: Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.....	13
2.1	: Penelitian Terdahulu.....	38
2.2	: Operasional Variabel Penelitian Tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	43
3.1	: Tabel Key Informan Dalam Penelitian.....	45
3.2	: Jadwal Waktu Penelitian.....	48
5.1	: Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
5.2	: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
5.3	: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	: Peta Rawan Bencana di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	11
2.1	: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang merdeka dan berdaulat, dan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (1) (Christine S.T. Kansil, 2003: 3). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah pemerintah Indonesia merupakan otonomi kepada setiap daerah atau provinsi-provinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah.

Dimana hal tersebut dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Disamping itu, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menentukan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Jimly Asshiddiqe, 2010: 240-241).

Dengan adanya potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Atas dasar Pemerintahan Daerah ini, maka munculah sistem otonomi daerah yang dikenal dengan Sistem Desentralisasi. Dimana yang dimaksud dengan sistem Desentralisasi ialah memberikan atau penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut, dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan. (C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2003: 142). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan daerah. (Ni'matul Huda, 2007:340).

Fungsi pemerintahan terbagi menjadi Fungsi Primer dan Fungsi Sekunder. Fungsi primer meliputi Pelayanan dan Pengaturan, sedangkan Fungsi sekunder meliputi Pembangunan dan Pemberdayaan.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasak 9 ayat (2) meliputi:

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan

3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanga Dearah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian dan
8. Transmigrasi

Jadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulanga Bencana Banjir di Kota Pekanbaru ialah termasuk pada **Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk Urusan Pemerintahan yang

dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Kota/Kabupaten dan menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Serta didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, eksternal serta harus berkepentingan nasional.

Salah satu fungsi pemerintahan dalam hal ini adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Terkait penanggulangan bencana banjir di Indonesia, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan intruksi khusus untuk menanggulangi banjir di Indonesia. Perintah tersebut dituangkan dalam intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15 April 2012 tentang penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor, bahwa dalam Instruksi Presiden tersebut dikatakan bahwa untuk penanggulangan banjir dan tanah longsor di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari status siaga darurat hingga transisi darurat ke pemulihan dan pasca sarjana, agar instansi terkait untuk menyiapkan rencana kontijensi penanggulangan banjir dan tanah longsor, pencegahan terjadinya banjir dan tanah longsor, pengendalian banjirdan tanah longsor, serta penanggulangan pasca bencana banjir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana

diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam antarlain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.

Bencana alam hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tidak dapat diprediksi dan adanya pasang naik air laut, hingga banjir yang disebabkan oleh manusia seperti membangun permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan hingga membuang sampah tidak pada tempatnya dan mengganggu sistem drainase. Selama ini penanggulangan bencana hanya dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya dianggap secara persial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*) (Depkominfo, 2007:12).

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Oleh karena itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang lebih dan tujuan untuk melindungi masyarakatnya haruslah membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat agar bencana yang terjadi dapat diatasi, salah satu diantaranya yaitu dengan membuat lembaga, badan atau organisasi yang diberikan wewenang lebih oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah banjir dengan lebih spesifik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas pokok sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai *leading sector* dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistik untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam pasal 4 tugas BPBD secara umum yaitu :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di atas, maka BPBD mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 33 provinsi, dan salah satu dari provinsi tersebut adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau saat ini merupakan provinsi yang sangat berkembang di setiap sektornya, baik sektor perindustrian, perekonomian, pariwisata, pendidikan dan terutama saat ini adalah pembangunan.

Pendukung kemajuan Provinsi Riau adalah dengan menyerahkan pengelolaan daerah-daerah Provinsi Riau kepada setiap pemerintahan di Kota ataupun kabupaten, khususnya Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan, merupakan Kota yang sangat berkembang terutama dalam pembangunan. Seperti, pembangunan gedung-gedung perkantoran, pemukiman masyarakat (perumahan), ruko-ruko (rumah toko), pasar, dan lain sebagainya. Sehingga dengan

pembangunan yang terus terjadi mengakibatkan berkurangnya lahan hijau yang merupakan bagian dari lingkungan hidup, yang mesti dijaga. Lingkungan hidup itu amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia bagi kebudayaan dan peradabannya. (N.H.T. Siahaan, 2009: 2).

Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara Nasional harus dipastikan berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kota Pekanbaru memiliki sungai utama yaitu Sungai Siak yang panjangnya 370 Km, dengan kedalaman 20-30 meter dan lebarnya 100-150 meter. Sungai ini dan anak sungai berfungsi sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi. Sedangkan wilayah daratan rendah Kota Pekanbaru pada umumnya merupakan daratan rawa gambut, daratan alluvial sungai dengan daerah daratan banjirnya.

Rumbai adalah salah satu wilayah pekanbaru yang berbatasan dengan Kabupaten Siak, secara demografi kota Rumbai memiliki posisi berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur. Rumbai ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari

barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut, Kota Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa Kecamatan yang paling rawan banjir yaitu:

1. Kecamatan Marpoyan Damai
2. Kecamatan Tampan
3. Kecamatan Rumbai
4. Kecamatan Rumbai pesisir
5. Kecamatan Bukit Raya
6. Kecamatan Sail
7. Kecamatan Lima Puluh
8. Kecamatan Payung Sekaki
9. Kecamatan Senapelan

Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran banjir di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1: Data Bencana Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017.

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Kecamatan Bukit Raya	6	-	-
2	Kecamatan Lima Puluh	1	-	-
3	Kecamatan Merpoyan Damai	-	1	-
4	Kecamatan Payung Sekaki	3	2	-
5	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-	-
6	Kecamatan Rumbai	3	10	-
7	Kecamatan Rumbai Pesisir	2	-	-
8	Kecamatan Sail	3	-	-
9	Kecamatan Senapelan	-	1	-
10	Kecamatan Sukajadi	1	-	-
11	Kecamatan Tampan	-	2	2
12	Kecamatan Tenayan Raya	3	2	-
Jumlah		22	18	2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

Menurut Nurjanah (2012:24) Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari pulung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah disisi sungai. Lazimnya Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. Akibatnya, sistem pengaliran saluran drainase dan kanal penampungan banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya-tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena dan ulah-manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.

Gambar 1.1 Peta Rawan Bencana di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

Salah satu instansi yang menangani masalah banjir yakni Badan Penanggulangan Bencana daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru pada Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan tugas dan Fungsi: Pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekontruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan para relawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang da barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepa, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sementara itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, yaitu:

Tabel I.2: Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1.	Mobil Rescue Double Cabin	Unit	1
2.	Mobil Dapur Umum	Unit	1
3.	Sepeda Motor	Unit	2
4.	Motor Boat	Unit	1
5.	Tikar	Unit	1
6.	Tenda	Unit	9
7.	Tas Selam	Buah	1
8.	Sepatu Karet	Buah	10
9.	Pelampung	Buah	10
10.	Tandu Evakuasi	Buah	2
11.	Water Treatment Portable	Set	1
12.	Perahu Karet	Unit	3

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

Pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru sedang berkembang, hal ini dapat terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di kota Pekanbaru. Di satu sisi hal tersebut memberikan dampak positif yang berarti Pekanbaru mengalami pembangunan infrastruktur yang berkembang dengan pesat. Pembangunan infrastruktur di Pekanbaru seharusnya dapat menimbulkan efek positif yang besar bagi masyarakat, infrastruktur ini benar-benar sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, namun hal ini berbeda hasilnya atau dampaknya jika pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu mengenai keseimbangan lingkungan.

Hal ini terlihat dari semakin sempitnya ruang untuk resapan air. Dengan tidak adanya ruang untuk resapan air maka saat ini terjadilah beberapa titik

genangan air. Baik itu berbentuk kecil maupun besar, genangan-genangan air ini kemudian jika tidak diatasi maka akan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan akibat dari kurangnya keseimbangan pembangunan sektor perkantoran dan perumahan di Kota Pekanbaru adalah yang tidak memfasilitasi bangunan-bangunan tersebut dengan sumur resapan dan drainase yang baik. Dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli banjir, membuang sampah sembarangan dan juga tidak membuat tanggul untuk menahan curah hujan yang tinggi.

Sehingga ketika musim hujan datang, Kota Pekanbaru akan mengalami banjir terutama di jalan-jalan utama yang terdapat kompleks pertokoan ataupun rumah-rumah masyarakat. Banjir ini menjadi salah satu penghambat masyarakat dalam menjalankan aktivitas, karena dengan terjadinya banjir maka sistem transportasi di sepanjang jalan yang digenangi air banjir akan mengalami kemacetan.

Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut maka salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru adalah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber daya Air dan Sumur Resapan. Sumur resapan yakni sumur atau lubang didalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke tanah. Alasan penting kenapa sumur resapan dibutuhkan dalam setiap bangunan yang berdiri ialah sumur resapan merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya banjir ketika musim penghujan sudah mulai datang.

Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-undang tentang penanggulangan bencana yang di tuangkan pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang atau peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur didalamnya.

Dari masalah yang di paparkan di atas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Penanganan banjir masih belum maksimal, sehingga tenaga relawan yang mencari atau membantu saat terjadinya bencana banjir atau bencana lainnya yang terjadi secara bersamaan. Contohnya bencana yang terjadi didua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

Dari fenomena diatas, maka penulis menetapkan judul penelitian sebagai berikut: **“Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

Kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Pekanbaru membutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai pihak, serta diperlukannya dukungan dari pemerintah daerah untuk merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan BPBD Kota Pekanbaru. Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas penulis mengacu kepada teori Hans Kelsen yaitu *Das Sollen Das*

Sein, dalam teori hukumnya telah menekankan adanya perbedaan antara *Das Sollen* yang disebut (*What Ought To Be*) atau Apa Yang Ada. *Das Sein*, dalam penelitian ini (*What Is*) atau Apa Yang Ada. Artinya penulis ingin melihat apa yang seharusnya dan senyatanya dan senyatanya yang terjadi dilokasi penelitian di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini: **“Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kota Pekanbaru?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

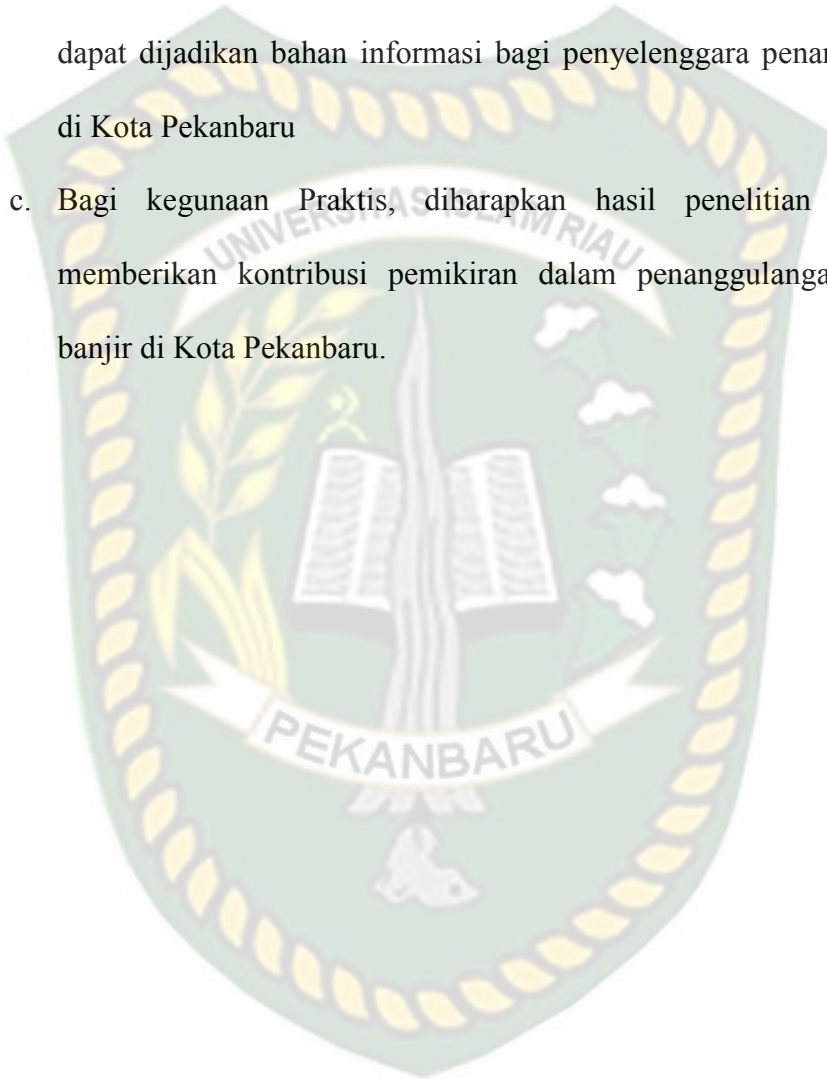
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Bencana Banjir.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Bencana Banjir.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuannya maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teori maupun praktis sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang Kinerja BPBD Kota Pekanbaru.
- b. Manfaat dan Kegunaan Teori yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi penyelenggara penanggulangan di Kota Pekanbaru
- c. Bagi kegunaan Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata perintah, yang paling sedikit “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, ke-dua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang pemerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif), (Syafiie, 2009;20). Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintah menurut Syafiie dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (2003:3) berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe” menjadi berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Senada dengan Syafiie, Ndraha dalam bukunya (2003:6) mengatakan bahwa pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik

dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2011;3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Widodo (2001;22) pemerintah lokal merupakan pemerintah di dekatkan pada rakyat. Dengan demikian akan dapat dikenali apa yang akan menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dijalani.

Kemudian, Salam dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia (2007:34) mengatakan bahwa untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kentosan bersama, diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu negara. Penguasa suatu negara dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi biasanya dikenal dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara biasa disebut dengan istilah pemerintahan.

Mustafa dalam bukunya Hukum Administrasi Negara indonesia (2001:17) mengatakan bahwa pemerintah adalah pimpinan negara, pimpinan dari organisasi yang disebut dengan negara. Sedangkan Friedman (Atmadja:2012) mengatakan

bahwa pemerintah sebagai pimpinan organisasi yang dibentuk dan ditentukan oleh kemauan umum (*volante general*) yang berdaulat dan “pemerintah atau raja itu” hanyalah merupakan wakil-wakil dari rakyat yang berdaulat.

Selanjutnya Finner (dalam Syafiie:2003) mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*proses*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, methode and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Musenaf (dalam Syafiie:2003) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan dalam dan keluar.
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan- pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Brasz (Syafiie:2003) berpendapat bahwa pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintah sebagai fungsi dari pada negara didalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga publik).

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Ndraha dalam bukunya (2003:76) menyatakan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Kemudian fungsi sekunder pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position dan semakin integratif masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

2. Konsep Kinerja

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja dalam pengertiannya diartikan sebagai prestasi yang diperlihatkan dalam kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan Lijan Poltak Sinambela (2014:140) mengemukakan bahwa kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila

ia mendapatkan manfaat (*benefit*) dan terdapat adanya rangsangan (*inducement*) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (*reasonable*).

Sementara itu, Mangkunegara (2006:9) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan secara kualitas dan kuantitas. Pencapaian tersebut dihasilkan dari pegawai yang bertanggungjawab dengan pekerjaannya.

Menurut Keban (2003:43), menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil (*the degree of accomplishment*) atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Selanjutnya, Steers (2003:67) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Sedangkan, Mahsun (2006:25) berpendapat bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Sedarmayanti dalam bukunya mengenai pengembangan kepribadian pegawai (2004:176) dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan

wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.

Moehariono (2010:60), mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Sementara itu, Robbins yang dikutip oleh Moehariono (2010:61) mengemukakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Seiring dengan hal itu, menurut Moehariono (2010:61) mengemukakan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja pegawai/karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Oleh karenanya, menurut model mitra-*lawyer*, kinerja individu pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor; (1) harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, (4) kebutuhan dan sifat, (5) persepsi terhadap tugas, (6) imbalan eksternal dan internal, serta (7) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja.

Sumber lain mengemukakan seperti yang dinyatakan oleh Otley yang dikutip oleh Mahmudi (2013:6) menyatakan bahwa kinerja mngacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Sejalan dengan pendapat Rogers yang dikutip oleh

Mahmudi (2013:6) yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of works*) , karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi.

Menurut Mahmudi (2013:20) berpendapat bahwa kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu:

1. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*;
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Wibowo (2011:4), berpendapat bahwa kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard (1993), bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Lain hal menurut Prawirosentono (1999:2), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Dan berbagai pendapat yang telah diuraikan di atas, bahwa definisi dari kinerja (*performance*) dapat disimpulkan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

3. Konsep Organisasi

Organisasi dalam bahasa Inggris yaitu *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungan satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhan. Sedangkan, Hasibuan (2006:120), mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah.

Mahsun (2006:1) memberikan pendapat tentang konsep organisasi, bahwa organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan

bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama.

Sementara itu, Robbins (2001:4) mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Kinerja Organisasi

Simanjuntak (2005:3) mengemukakan bahwa kinerja organisasi merupakan agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di organisasi tersebut. Dengan demikian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan manajemen dan kinerja setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi antara lain dalam penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi dan penyediaan prasarana serta sarana kerja.

Sementara itu, Surjadi (2009:7) berpendapat bahwa kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Sobandi (2006:176), kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit* maupun *impact*.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Mahmudi (2013:20) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*;
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:67) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

1) Faktor Kemampuan

Secara umum kemampuan ini terbagi menjadi dua yaitu, kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realiti (*knowledge and skills*).

2) Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seseorang pekerjayang dalam menghadapi situasi kerja.

b. Indikator Kinerja

Menurut Moehariono (2010:74), indikator kinerja (*performance indicator*) didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur *output* atau *outcome* suatu kegiatan.

- 2) Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
- 3) Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- 4) Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Hal lain, Mhamudi (2013:155) berpendapat bahwa indikator kinerja merupakan saran atau (*means*) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (*ends*).

Selain itu pula, Mahmudi (2013:156) mengemukakan peran indikator kinerja diantaranya yaitu:

- 1) Membantu memperbaiki praktik manajemen
- 2) Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan tanggungjawab secara eksplisit dan pemberian bukti atas suatu keberhasilan atau kegagalan.
- 3) Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan pengendalian.
- 4) Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja di semua level organisasi.
- 5) Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staff.

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson yang dikutip oleh Wibowo (2011:102) terdapat tujuh indikator kinerja yaitu:

- 1) Tujuan merupakan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja individu, kelompok dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
- 3) Alat atau sarana, merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan

- tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
- 4) Kompetensi, merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
 - 5) Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan yang mengakibatkan disinsentif.
 - 6) Peluang, pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
 - 7) Umpan balik, antar tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Sedangkan Moehariono (2012:110), indikator kinerja dalam Akuntabilitas

Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) disajikan sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan.
- 2) Keluaran (*outputs*), kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik.
- 3) Hasil (*outcomes*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Manfaat (*benefit*), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

- 5) Dampak (*impacts*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, dan teknologi.

Sementara itu, Zeithml, Parasuraman dan Berry yang dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010:175) mengemukakan indikator kinerja pelayanan sebagai berikut:

- 1) *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
- 2) *Reliability* atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- 3) *Responsivness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
- 4) *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.
- 5) *Empathy* adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.

5. Konsep Bencana

Menurut W. Nick Carter yang dikutip oleh Nurjanah dkk (2013:10) memberikan definisi bencana yang dimuat dalam buku *disaster management* yaitu:

“an event, natural or man-made, sudden or progressiv, which impacts with such severity that the affected community has to respond by taking exceptional measures”

Definisi lain menurut *Internasional Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR-2002,24) adalah:

“a serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic, or enviromental losses which its own resources”.

(“suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda da kerusakan

lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya”).

Berdasarkan definisi bencana di atas, dapat digeneralisasikan bahwa untuk dapat disebut “bencana” harus dipenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Ada peristiwa,
- 2) Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia,
- 3) Terjadi secara tiba-tiba (*sudden*) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap (*slow*),
- 4) Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain,
- 5) Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Sedangkan definisi menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu sebagai berikut:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Menurut Nurjanah dkk (2013:13) menyatakan bahwa peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, baru dapat disebut bencana ketika masyarakat manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulangnya. Ancaman alam itu sendiri tidak selalu berakhir dengan bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapinya dan pada akhirnya terkena dampak. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam , sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak.

Terjadinya bencana adalah karena adanya pertemuan antara bahaya dan kerentanan, serta ada pemicunya.

a. Faktor-faktor Penyebab Bencana

Menurut Nurjanah dkk (2013:21) menyatakan terdapat tiga penyebab terjadinya bencana yaitu: (1) Faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa campur tangan manusia, (2) Faktor non-alam (*non-natural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, (3) Faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Menurut UNDRO (1992) yang dikutip oleh Nurjanah dkk (2013:22) ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kerentanan, adalah (1) berada di lokasi berbahaya, (2) kemiskinan, (3) perpindahan penduduk dari desa ke kota, (4) kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, (5) penambahan penduduk yang besar, (6) perubahan budaya, dan (7) kurangnya informasi dan kesadaran.

Sedangkan menurut Eko Teguh Paripurno dalam Nurjanah dkk (2013:22), sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan kedalam empat sumber ancaman, yaitu:

- 1) Sumber ancaman klimatologis
Adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak dipantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca
- 2) Sumber ancaman geologis
Yaitu sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi
- 3) Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi
Adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan, atau dapat pula akibat proses persiapan produksi
- 4) Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman

Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman.

b. Manajemen Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefinisikan bahwa manajemen bencana (*disaster management*) sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Nurjanah dkk (2013:42) mengemukakan bahwa manajemen bencana (*disaster management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang meliputi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Sedangkan menurut W. Nick Carter dalam Nurjanah (2013:44) definisi manajemen bencana yaitu :

“an applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disaster, to improv measures relaitng to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery”.

Selanjutnya dalam wikipedia, emergency management (2007) mengemukakan bahwa penanggulangan bencana adalah proses yang terus menerus dimana setiap individu, kelompok, dan masyarakat berusaha mengatur

risiko menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang dihasilkan dari suatu musibah.

c. Prinsip-prinsip Manajemen Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 3 disebutkan bahwa azas/ prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana yaitu: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi

Selain itu, Nurjanah dkk (2013:45) mengemukakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut:

- 1 Cepat dan Tepat
Bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan dengan secara cepat dan tepat sesuai dengan tujuan keadaan.
- 2 Prioritas
Prioritas dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan.
- 3 Koordinasi dan Keterpaduan Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 4 Berdayaguna dan Berhasilguna
Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.
- 5 Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

- 6 Kemitraan
Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
- 7 Pemberdayaan
Penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.
- 8 Non Diskriminatif
Penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.
- 9 Non-Proselitisi
Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama dan atau keyakinan.

d. Tahapan Penanggulangan Bencana

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Bencana

Tujuan : Pengurangan Resiko Bencana
Manajemen : Manajemen Risiko bencana
Penyelenggaraan : Situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana

Kegiatan :

- 1) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (situasi tidak terjadi bencana).
- 2) Mitigasi (*mitigation*) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (situasi terdapat potensi bencana).

2. Tahapan Saat Bencana

Tujuan : Penanganan Darurat

Manajemen : Manajemen Darurat

Penyelenggaraan : Situasi Tanggap Darurat

Kegiatan:

- 1) Tanggap darurat (*emergency response*) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Tahapan Pasca Bencana

Tujuan : Pemulihan

Manajemen : Manajemen pemulihan

Penyelenggaraan : Situasi tanggap darurat

Kegiatan:

- 1) Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 2) Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, teganya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

6. Konsep Banjir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), banjir adalah berair banyak dan deras, atau terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Dengan kata lain, banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan, *Wikipedia* mengemukakan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendunga sehingga air keluar dari batasan alaminya. Banjirpun dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai.

Menurut Pusat pendidikan Mitigasi Bencana (2010) mengemukakan bahwa banjir adalah peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volum air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan sungai, atau pecahnya bendungan sungai.

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002) sebab-sebab alami banjir antara lain :

1. Curah hujan
2. Pengaruh fisiografi
3. Erosi dan sedimentasi
4. Kapasitas sungai

5. Kapasitas drainase yang tidak memadai
6. Pengaruh air pasan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori. Dari penelitian ini penulis tidak menemukan judul yang sama seperti penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.1 : Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator	Hasil
1	2	3	4	5	6
1	Evan Sarli Rakasiwi	Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bancana Banjir di Kota Bandar Lampung.	Strawaji (2009)	a. Pendekatan sasaran (<i>Good Approach</i>) b. Pendekatan Sumber (<i>System Resource Approach</i>) c. Pendekatan Proses (<i>Internal Process Approach</i>)	Untuk menghadapi kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berubah-ubah, sesuai dengan kondisi yang ada, maka dibuatlah sebuah Rencana dan Strategi (Renstra) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.
2	Wulandari A. Surya	Tugas Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh	Moekijati (1998)	a. Pengarahan . b. Mengatur, membimbing. c. Menetapkan dan menginformasikan.	Hasil Tanggapan Responden mengenai Tugas
		Kota dalam Menangani Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.		d. Melaporkan dan meneliti. e. Kewajiban dan bertanggung jawab kan.	Badan Penanggula Ngan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Menangani Bencana Alam di Lima Puluh Kota adalah 30 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak

					39% menyatakan baik.
3	Ahmad Ansori	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Siak.	Moehariono (2012)	a. Input b. Output c. Outcome d. Benefit e. Impact	Adanya Koordinasi seluruh elemen dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga tugas dan fungsi BPBD tidak hanya disibukkan dengan menangani lahan saja tetapi bisa terus memberikan pendidikan dan pelatihan serta edukasi kepada masyarakat

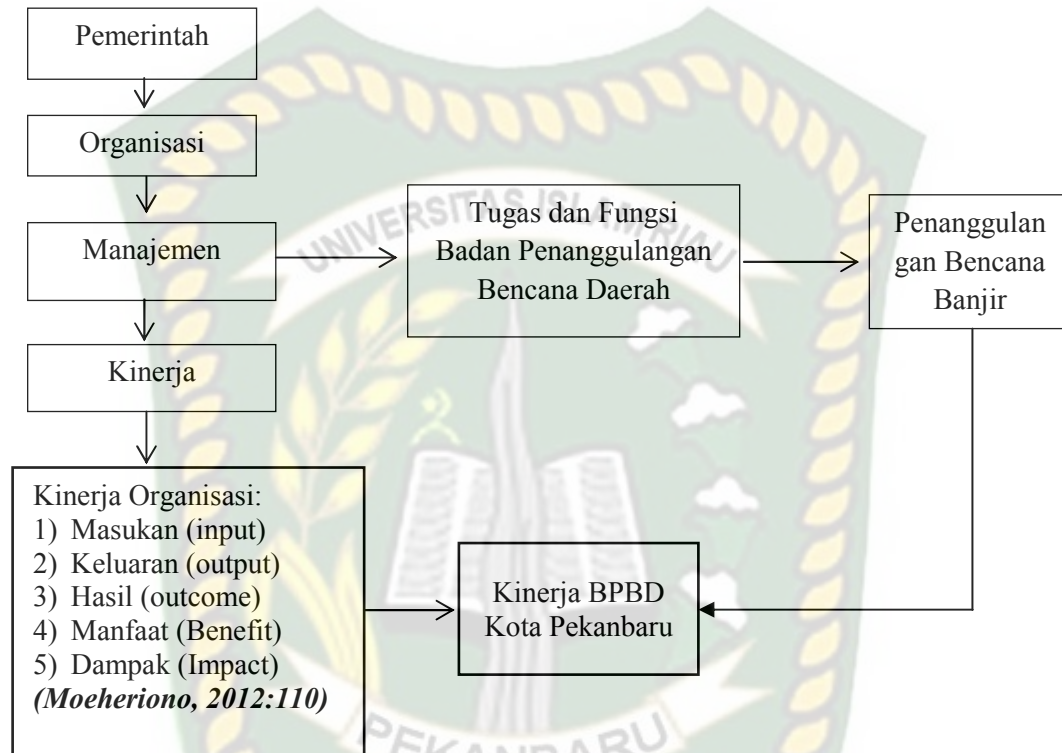
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam penanggulangan bencana banjir, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka berfikir. Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin di capai dari penelitian.

Menurut Sugiyono (2010:65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, oleh karenanya peneliti berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka berfikir :

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber: Olahan Data, 2018

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan pada penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan.
- b. Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan

secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

- c. Manajemen adalah pengelolaan sumber daya yang memiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Kinerja adalah hasil kerja yang diberikan dan dicapai sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, serta potensi yang ada untuk menjalankan aktivitas tertentu maupun serangkaian aktivitas.
- e. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya suatu hal secara berulang dengan metode dan cara yang layak untuk digunakan.
- f. Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah salah satu lembaga teknik yang dimiliki pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan terhadap kejadian bencana alam.
- h. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilakukan melalui indikator berikut ini :

- 1) Indikator masukan (*inputs*) dalam penelitian ini yakni terjadinya kecukupan sumberdaya manusia, adanya kebijakan penanganan penanggulangan bencana banjir.

- 2) Indikator keluaran (*output*) dalam penelitian ini yakni adanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana banjir, serta adanya program kerja melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.
- 3) Indikator hasil (*outcomes*) dalam penelitian ini yaitu semakin berkurangnya luas daerah yang terkena banjir dan terbentuknya masyarakat peduli banjir di setiap lingkungan.
- 4) Indikator manfaat (*benefit*) dalam penelitian ini tercapainya target yang ditetapkan dalam melakukan penanggulangan bencana banjir.
- 5) Indikator dampak (*impacts*) dalam penelitian ini yakni adanya dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penanggulangan bencana banjir secara positif mengarah perubahan perilaku masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kinerja atau <i>performance</i> merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi aktivitas-aktivitas penting (Moheriono, 2012:95)	Kinerja	Masukan (<i>Input</i>)	a. Kecukupan personil b. Adanya tugas dan fungsi penanggulangan bencana banjir c. Tersedia anggaran operasional berasal dari daerah, provinsi, dan pusat.
		Keluaran (<i>Output</i>)	a. Tersedianya sarana prasarana kerja b. Program kerja yang jelas c. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat
		Hasil (<i>outcome</i>)	a. Kurangnya daerah yang terkena banjir b. Terbentuknya masyarakat peduli banjir c. Adanya koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir
		Manfaat (<i>benefit</i>)	a. Tercapainya target kerja organisasi b. Evaluasi kekurangan dan kelebihan kinerja
		Dampak (<i>impact</i>)	a. Terbentuknya perilaku masyarakat tidak lagi membuang sampah b. Terbentuknya masyarakat yang peduli dengan lingkungan

Sumber: Olahan Penelitian, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan pertimbangan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian “*survey deskriptif*” yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Dan menggunakan “*metode kualitatif*” dengan tujuan dari penggunaan metode ini agar dapat menunjang tingkat akurasi dan agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dalam melakukan penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Dalam pemilihan lokasi ini didasarkan dengan alasan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah Kota pekanbaru yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana dan segala akibat yang di munculkannya serta diharapkan akan diperoleh informasi kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Pekanbaru. Terkhusus didaerah Pesisir Rumbai yang daerah nya rendah sering terkena bencana banjir akibat meluapnya sungai siak.

C. Informan dan Key Informan

Untuk pemilihan subjek atau informan pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua yaitu Key Informan dan Informan. Dimana Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Sedangkan penentuan Key Informan berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah : Plt. KALAKSA BPBD, dan yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik, ketua RT dan RW, Masyarakat.

Tabel III.1 Tabel Key Informan Dalam Penelitian

No	Informan	Status	Keterangan
1.	Burhan Gurning, S.Pd., M.Pd	Plt. Kalaksa BPBD	Informan Kunci
2.	Okta Nahuwai. SH	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Informan
3.	Iwan Situmorang, S.sos, M.Si	Kabid Kedaruratan dan Logistic	Informan
4.	Agustini	Ketua RW 02 Kelurahan Meranti Pandak	Informan
5.	Ali Imran	Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Meranti Pandak	Informan
6.	Umar. RK	Tokoh Masyarakat	Informan
7.	Warisman	Masyarakat	Informan
8.	Yulianti	Masyarakat	Informan
9.	Sastri	Masyarakat	Informan
10.	Budi Mardianto	Masyarakat	Informan
Jumlah			10

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik penarikan informan yaitu dengan teknik “*snowball sampling*”, yaitu teknik pengambilan sample sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

E. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang dilakukan yang bertolak dari tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis Kecamatan Rumbai Pesisir
2. Struktur organisasi Badan Paenanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Data Banjir di Kecamatan Tampan.
4. Rencana Strategis BPBD.
5. Peraturan Perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan langsung dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan caramelakukan pengamatan langsung pada objek studi yan g telah ditetapkan.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan.
- c. Dokumentasi yaitu dengan cara mengabdikan dokumentasi berupa foto-foto penelitian sebagai bentuk keabsahan dari penelitian yang dilaksanakan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklarifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2018, Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Agustus- November				Desember- Maret				April-Juli				Agustus- November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2018

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana, baik yang berada di pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejak tahun 2008 dibentuk BNPB di tingkat pusat, sedangkan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BPBD. Pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Badan tersebut dibentuk untuk membantu masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah kebencanaan yang terjadi. Ketentuan mengenai pemebentukan, fungsi, tugas struktur organisasi dan tata kerja lembaga BNPB diatur dalam peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB, sedangkan ketentuan mengenai BPBD diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing.

Maka dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dibentuklah BPBD Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2017 tentang pembentukan dan tugas pokok, fungsi, rincian tugas jabatan pada BPBD Kota Pekanbaru, sebagai penjabaran dari amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Peanggulangan Bencana.

VISI

“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani” Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pembantuan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat termasuk dalam kelompok urusan wajib pelayanan dasar.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki BPBD dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, program wajib BPBD Kota Pekanbaru tidak secara langsung mendukung capaian target sasaran dari RPJMD tersebut.

Namun demikian pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis BPBD Tahun 2017-2022 merupakan implementasi dari tugas dan fungsi BPBD selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru memiliki keselarasan dengan tujuan Misi Pembangunan Ke-3 dari dokumen RPJMD Kota Pekanbaru dalam rangka *“Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas”* dengan sasaran yang ingin dicapai adalah *“terwujudnya pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi”*.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Misi sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai berikut :

1. Melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
2. Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada misi dan misi, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan:

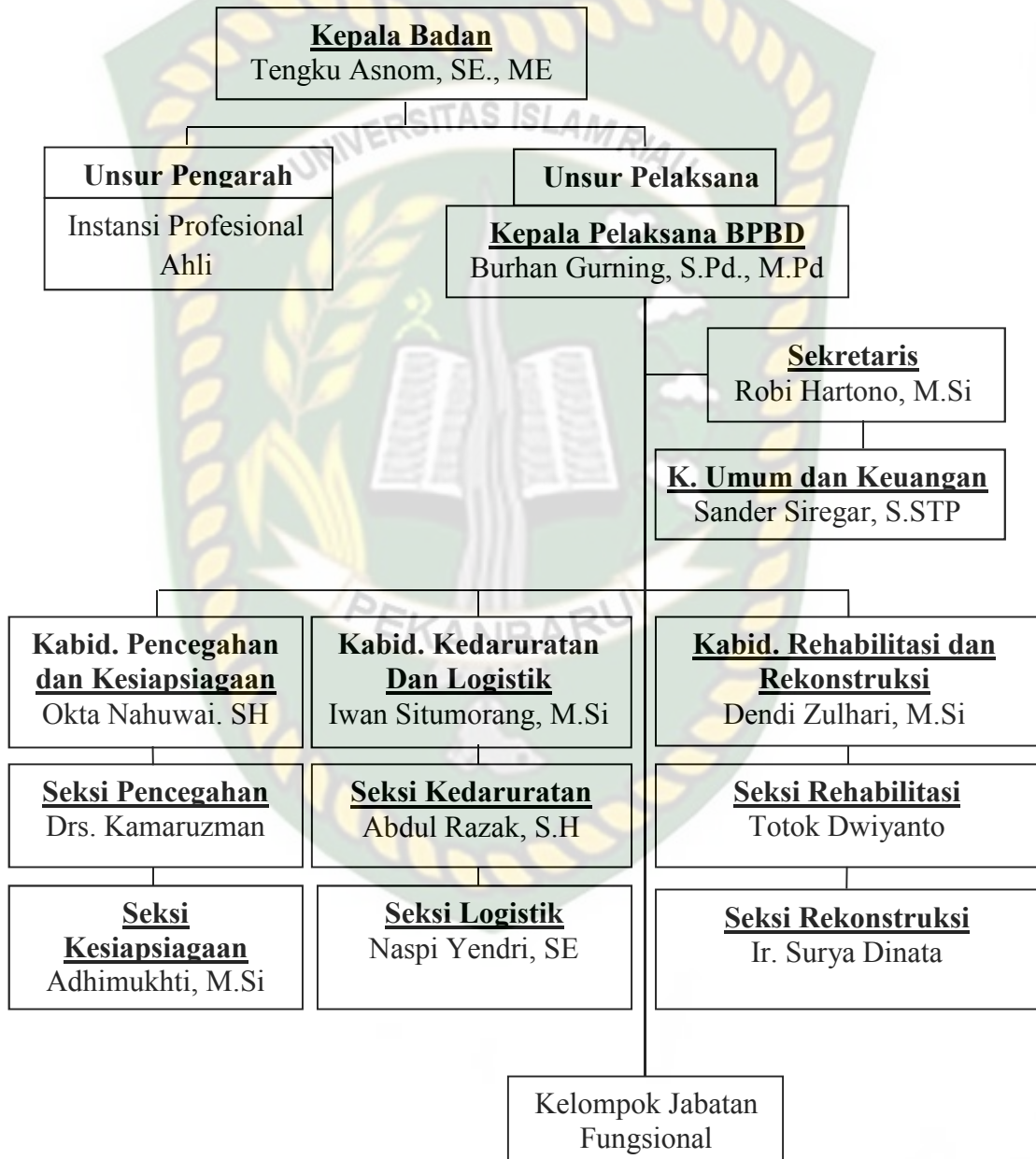
1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
2. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
3. Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur public pasca bencana.
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2019 adalah:

1. Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya pengurangan resiko bencana.
2. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulan bencana yang efektif dan profesional.
3. Terlaksananya fasilitas dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
PEKANBARU**



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, 2019

Susunan Organisasi BPBD Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Badan

1. Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
3. Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

2. Unsur Pengarah

1. Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
2. Unsur Pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
3. Pengaturan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

1. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
2. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan.
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi.
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam BPBD Kota Pekanbaru terdapat Tata Kerja BPBD Kota Pekanbaru tersebut ialah:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup BPBD Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-

masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

8. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

1. Kepala Badan

1. Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

3. Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

2. Unsur Pengarah

1. Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
2. Unsur Pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat professional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
3. Pengaturan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

1. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
2. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

1. Seksi Kedaruratan.
2. Seksi Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:

1. Seksi Rehabilitasi.
2. Seksi Rekonstruksi.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan

1. Kepala Badan

(1) Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana dan tugas pembantuan lainnya.

(2) Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, efektif dan efisien.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

- d. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. penyusunan dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana.
- f. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- i. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
- j. pelaksanaan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarahan

1. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
2. Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- d. pelaksanaan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

A. Kepala Pelaksana BPBD

Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi serta membantu dan menjalankan tugas sehari-hari BPBD.

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penanggulangan bencana.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana.
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Sekretaris Unsur Pelaksana Badan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Unsur Pelaksana Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Unsur Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran BPBD.
 - c. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - d. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - f. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.

- g. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat serta pengurangan resiko bencana.
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat serta pengurangan resiko bencana.
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra

bencana, pemberdayaan masyarakat serta pengurangan resiko bencana.

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat serta pengurangan resiko bencana.
- f. penyusunan program kerja dan kegiatan operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- g. pelaksanaan fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pihak yang membutuhkan.
- h. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan teknis, simulasi dan gladi.
- i. penyusunan daftar pertanyaan, monitoring lapangan, pengevaluasian dan penyusunan laporan evaluasi data pencegahan pra bencana.
- j. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan serta analisis data potensi bahaya atau ancaman bencana.
- k. pelaksanaan peninjauan lapangan untuk mengetahui situasi yang ada pada saat terjadi bencana yang selanjutnya dapat dijadikan untuk menyusun konsep pedoman teknis pencegahan bencana dan pengurangan resiko bencana.

1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan kedaruratan dan logistik.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
 - c. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
 - d. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

- f. pelaksanaan fasilitasi pada pihak yang membutuhkan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat.
- g. pelaksanaan pengumpulan data, observasi lapangan, mengkaji dan menyajikan data tentang kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah sarana prasarana yang rusak.
- h. pengumpulan dan pengelolaan serta analisis darurat tanggap bencana.
- i. pelaksanaan penanganan korban bencana dan pengungsi.
- j. penyusunan konsep rencana pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi saat tanggap darurat.
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- l. pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban-korban bencana.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
- d. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
- g. pelaksanaan fasilitasi pada pihak yang membutuhkan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata Kerja BPBD Kota Pekanbaru

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup BPBD Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

- simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
 3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 4. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
 6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
 7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

8. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

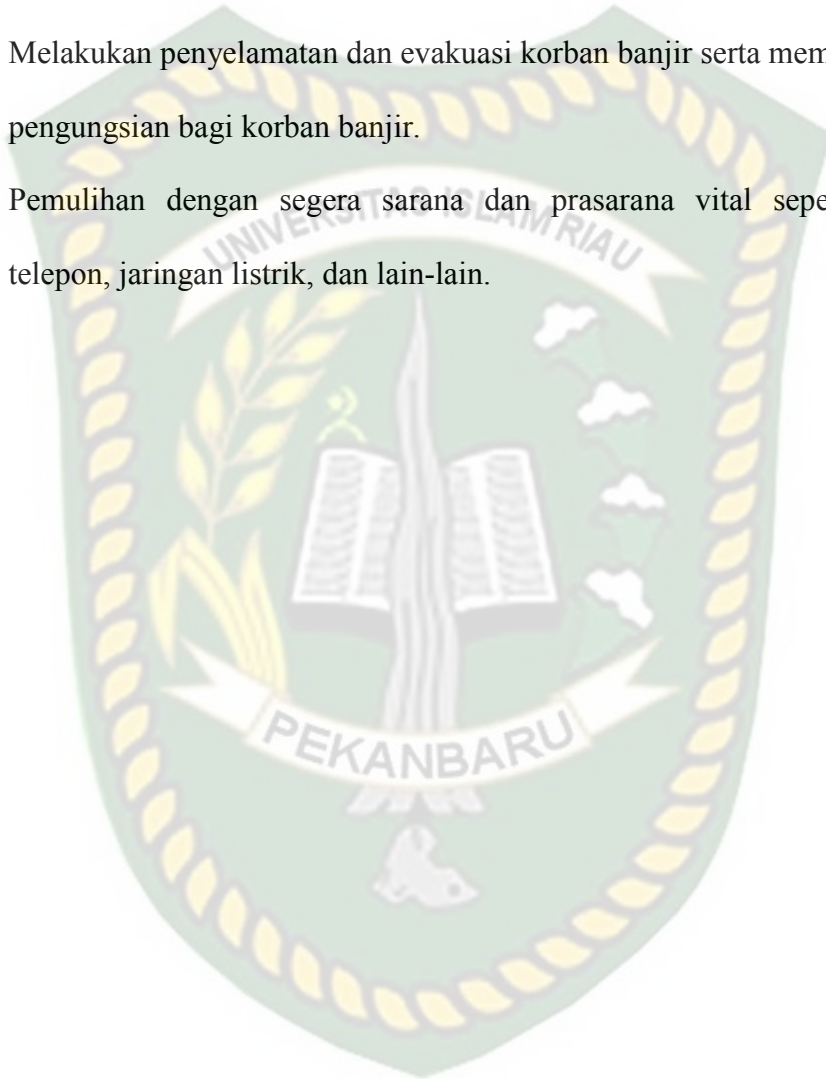
**Tujuan, Sasaran, dan Program Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekanbaru
Tahun 2017-2022**

No	Tujuan	Sasaran	Program
1.	Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana daerah	a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		b. Meningkatnya responsive penanganan bencana dan kebakaran lahan/hutan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
2.	Mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat yang tangguh bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Berangkat dari Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Pekanbaru serta program kerja BPBD Kota Pekanbaru, sedangkan penanganan yang dilakukan BPBD Kota Pekanbaru pada saat bencana banjir terjadi, yaitu :

1. BPBD Kota Pekanbaru melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terjadinya banjir dan memperkirakan kerusakannya.

2. Menentukan status keadaan darurat bencana banjir.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana siaga banjir.
4. Menurunkan personil BPBD Kota Pekanbaru ke lokasi terjadinya banjir
5. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban banjir serta mempersiapkan pengungsian bagi korban banjir.
6. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital seperti saluran telepon, jaringan listrik, dan lain-lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. Distriusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 5.1 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dengan persentase 70%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 30%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	1	10 %
4	SMA	5	50 %
5	D1-D3	1	10 %
6	D4-S1	1	10 %
7	S2	2	20 %
8	S3	-	-
Jumlah		10	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 1 orang atau 10%, SMA sebanyak 5 orang atau 50%, diploma sebanyak 1 orang atau 10%, sarjana sebanyak 1 orang atau 10%, dan tingkat pendidikan pascasarjana

berjumlah 2 orang atau 20%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 5 orang.

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	20%
2.	31 – 40	3	30%
3.	41 – 50	5	50%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 20%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 30%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 50%, Jadi berdasarkan

gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 5 orang atau 50% sudah berumur 41-50 tahun.

B. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja dalam pengertiannya diartikan sebagai prestasi yang diperlihatkan dalam kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan Lijan Poltak Sinambela (2014:140) mengemukakan bahwa kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (*benefit*) dan terdapat adanya rangsangan (*inducement*) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (*reasonable*).

Moehariono (2010:60), mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Sementara itu, Robbins yang dikutip oleh Moehariono (2010:61) mengemukakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Seiring dengan hal itu, menurut Moehariono (2010:61) mengemukakan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan

dengan kepuasan kerja pegawai/karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu.

Moehariono (2012:110), indikator kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) disajikan sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan.
- 2) Keluaran (*outputs*), kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik.
- 3) Hasil (*outcomes*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Manfaat (*benefit*), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- 5) Dampak (*impacts*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, dan teknologi.

Kinerja yang di maksud dalam hal ini ialah bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas nya untuk menaggulangi bencana banjir yang terjadi di kota Pekabaru, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru adalah salah satu Instansi Pemerintah kota Pekanbaru yang menangani permasalahan bencana banjir yang terjadi di kota pekanbaru.

Untuk melihat Pelaksanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru, maka

penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Masukan (*Input*)

Secara umum input yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan di proses di dalam suatu kegiatan. Input adalah semua potensi yang ‘dimasukkan’ sebagai modal awal kegiatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Moehariono (2012: 110) masukan (*input*) yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan. selanjutnya yang dimaksud dengan masukan (*input*) dalam penelitian ini yakni terjadinya kecukupan sumberdaya manusia, adanya kebijakan penanganan penanggulangan bencana banjir. Untuk mengukur input dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator, yaitu :

a. Kecukupan personil

Kecukupan personil yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang apakah personil dari BPBD Kota Pekanbaru sudah mencukupi dalam menanggulangi banjir di kota Pekanbaru. BPBD Kota Pekanbaru hanya memiliki personil sebanyak 27 orang dan itupun dibagi menjadi beberapa kelompok, hal ini merupakan jauh dari kata cukup karena dengan 27 orang personil tidak akan mampu menanggulangi bencana banjir yang ada di Kota Pekanbaru, dengan titik banjir yang banyak di Kota Pekanbaru maka personil yang ada di BPBD Kota Pekanbaru akan sangat kesulitan dalam menanggulangi banjir yang di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Burhan Guing selaku Plt.

Kalaksa BPBD Kota Pekanbaru pada hari Kamis, 05 September 2019 Pukul 09.00

WIB, beliau mengatakan :

“Ya, kalau masalah personil kami akui dalam menanggulangi banjir kami rasa ini masih kurang, karena banyak hal yang harus dilakukan dalam penanggulangan banjir tersebut. Jumlah personil yang diturunkan lebih kurang 27 orang dan itu saya rasa sangat masih kurang apabila banjir yang ada semakin lama semakin bertambah, apalagi banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru ini tidak hanya di daerah Rumbai Pesisir saja sehingga kami agak kesulitan dalam menanggulangi banjir karena dengan banyak titik yang terkena banjir tersebut”.

Dengan luasnya wilayah Kota Pekanbaru dan banyaknya titik banjir yang ada maka BPBD Kota Pekanbaru merasa kesulitan dalam menanggulangi banjir yang ada sehingga masih banyak area banjir yang belum bisa ditanggulangi oleh BPBD Kota Pekanbaru. Sementara itu Ali Imran selaku Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir mengatakan bahwa :

“Masalah personil yang dimiliki BPBD Kota Pekanbaru saya kurang tau sebenarnya tapi ketika banjir disini saya rasa hanya sedikit personil dari BPBD yang turun atau mungkin personil yang lainnya ditugas dititik banjir yang lain saya juga kurang tau, yang penting menurut saya untuk RT kami ini hanya sedikit personil dari BPBD yang turun kesini”.

Dari hasil penelitian diatas tentang indikator masukan (input) yang berkaitan dengan jumlah personil BPBD Kota Pekanbaru dalam menaggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa jumlah personil yang ada di BPBD Kota Pekanbaru masih sedikit dan belum bisa mengcover titik-titik banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

Sedangkan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, personil BPBD Kota Pekanbaru tidak sampai 27 orang yang berada di Kantor BPBD Kota Pekanbaru karena personil BPBD Kota Pekanbaru membagi personil

yang ada menjadi tiga kelompok, dan tiga kelompok tersebut akan di jadwalkan piket sesuai dengan aturan yang di Kota Pekanbaru.

b. Adanya tugas dan fungsi penanggulangan bencana banjir

Dalam sub indikator ini merupakan tugas dari masing-masing bidang yang ada di BPBD Kota Pekanbaru. Pembagian tugas dari baik itu perorangan ataupun kelompok dari masing-masing bidang yang ada di Kota Pekanbaru belum terlihat jelas karena tugas yang diberikan hanya secara umum saja, tugas yang diberikan bukan untuk seseorang personil karena tidak ada pembagian tugas masing-masing personil dalam menanggulangi banjir, apabila banjir sudah terjadi maka personil dari BPBD Kota Pekanbaru melaksanakan tugas apa yang mereka bisa saja tidak ada personil yang mengemban tugas secara khusus. BPBD Kota Pekanbaru hanya melaksanakan tugas secara umum seperti yang terlampir dalam pada Perda No.06 Tahun 2017 dan Perwako No.281 Tahun 2017. Belum adanya pembagian tugas dari masing-masing personil yang ada di BPBD Kota Pekanbaru. Tetapi berdasar hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Iwan Situmorang yang merupakan Kabid Kedaruratan dan Logistic, beliau mengatakan :

“Sebenarnya pembagian tugas dan fungsi masing-masing pegawai dari BPBD Kota Pekanbaru sudah ada hanya saja terkadang tugas yang diberikan atasan kepada personil atau pegawai BPBD tersebut tidak diindahkan dengan baik sehingga fungsi dari BPBD Kota Pekanbaru tidak terlalu tampak, sementara SOP dari masing-masing bidang sudah sangat jelas”.

Pembagian tugas yang diberikan di BPBD Kota Pekanbaru hanya menurut bidang masing-masing, apabila ada personil yang tidak bisa melakukan tugas dibidangnya maka personil lain akan diminta untuk melakukan tugas tersebut sehingga masih belum terlihat pembagian tugas dari masing-masing personil

BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Sedangkan Burhan Gurning mengatakan bahwa :

“Mengenai pembagian tugas dan fungsi di BPBD saya kira sudah cukup baik hanya saja dalam pembagian tugas tersebut terkadang kami agak kesulitan karena masih kurang sehingga satu personil harus mengemban tugas lebih dari satu. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai pembagian tugas dan fungsi pada BPBD secara keseluruhan sudah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru No.06 Tahun 2017 Perwako No.281 Tahun 2017”.

Dari hasil penelitian diatas tentang indikator masukan (input) yang berkaitan dengan pembagian tugas dalam menaggulangi banjir dapat diketahui bahwa pembagian tugas yang dilakukan di BPBD Kota Pekanbaru belum cukup jelas karena masih ada personil yang tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Sedangkan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, masih banyak pegawai yang tidak tau dengan tugas dan fungsinya di BPBD Kota Pekanbaru, hal ini peneliti katakana karena dilapangan menemukan ada beberapa personil yang duduk-duduk santai pada saat jam kerja, dan yang lainnya sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Pada saat peneliti meminta SOP pada salah seorang personil BPBD Kota pekanbaru mereka tidak memilikinya sehingga peniliti menyimpulkan bahwa belum ada pembagian tugas untuk masing-masing personil dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru.

- c. Tersedia anggaran operasional berasal dari daerah, provinsi, dan pusat.

Indikator input dapat juga dilihat dari ada atau tidaknya anggaran operasional dalam menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru. Anggaran yang disediakan untuk BPBD Kota Pekanbaru masih kurang ini dilihat dari hanya beberapa sarana dan prasana yang bisa disediakan oleh BPBD Kota Pekanbaru.

BPBD masih kekurangan sarana dan prasarana untuk menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru hal ini dikarenakan sedikit anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada BPBD Kota Pekanbaru.

Dengan anggaran yang minim jangankan untuk operasional untuk melengkapi sarana dan prasarana di BPBD Kota Pekanbaru saja masih kurang sehingga hal ini sangat berpengaruh kepada kinerja BPBD dalam menanggulangi banjir di Pekanbaru. Masalah anggaran tersebut hanya berasal dari Kota Pekanbaru saja, pemerintah provinsi ataupun pusat belum ada disediakan anggaran khusus untuk BPBD Kota Pekanbaru, anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Pekanbaru sehingga BPBD Kota Pekanbaru masih kekurangan anggaran baik untuk operasional ataupun untuk melengkapi sarana dan prasara dalam menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Burhan Guning, beliau mengatakan :

“Sudah barang tentu itu, kalau anggarannya cukup tentu kami tidak kesulitan dalam mananggulangi banjir, anggaran di BPBD Kota Pekanbaru ini hanya berasal dari APBD Kota Pekanbaru, kalau dari provinsi dan pusat kami belum ada dapat bantuan sehingga masih banyak anggaran yang kami perlukan, paling tidak kami bisa menambah personil, dana untuk operasional dan sarana yang kami perlukan”.

Sementara itu Okta Nahuwai, menambahkan :

“Kalau dari pemerintah Kota Pekanbaru memang sudah disediakan untuk BPBD Kota Pekanbaru, tapi kan itu tidak seberapa, sementara kami memerlukan anggaran yang cukup banyak ya untuk operasional, melengkapi peralatan kami. Jadi bagaimana kerja kami bisa maksimal hasilnya sementara kami hanya mengandalkan alat-alat yang ada”.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, sebenarnya sudah tersedia anggaran untuk operasional BPBD Kota Pekanbaru dalam

menanggulangi banjir tetapi anggaran tersebut masih kurang, dengan anggaran yang sedikit maka hasil dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru tidak akan maksimal karena titik banjir di Kota Pekanbaru sangat banyak. Dan kemudian dari pada itu anggaran yang di sediakan untuk operasional ada juga dialihkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di kantor BPBD Kota Pekanbaru tersebut.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk indikator input masih banyak kekurangan salah satunya masih kurangnya personil yang ada di BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir, tugas yang diberikan pada masing-masing personil belum terlihat jelas dan BPBD Kota Pekanbaru masih kurang anggaran baik itu untuk operasional ataupun untuk melengkapi sarana dan prasaran dalam menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Keluaran (*Output*)

Secara umum Output diartikan sebagai hasil yang dicapai dalam jangka pendek. Output adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Margaret (2002) Output juga mengandung arti jumlah atau units pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang telah dilayani. Sedangkan NEA (2000) mengartikan ouput yaitu hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, yang diukur dengan menggunakan takaran volume/banyaknya.

Sedangkan Moehariono (2012:110) mengatakan output yaitu kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik. Yang

dimaksud dengan output dalam penelitian ini yaitu hasil dari kinerja BPBD dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru. Untuk melihat hasil dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator output, yaitu :

a. Tersedianya sarana prasarana kerja

Untuk merasakan output dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana kerja BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. BPBD Kota Pekanbaru masih kekurangan sarana dan prasarana kerja dalam menanggulangi banjir BPD Kota Pekanbaru masih kekurangan sarana dan prasarana mereka hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga hasil dari kinerja BPBD belum maksimal dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat, hal ini menjadi kendala terlaksananya kinerja BPBD Kota Pekanbaru dengan baik. Hasil wawancara dengan Burhan Bungin yang ditemui pada hari Kamis, 05 September 2019 Pukul 09.00 WIB mengatakan:

“Nah....ini sebenarnya cukup menjadi permasalahan bagi kami disini, bagaimana tidak?sebenarnya ada sarana dan prasarana yang tersedia tetapi sangat masih kurang dalam hal menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru ini, perahu karet yang ada saja baru kami miliki cuma 3 unit jadi kami agak sulit ketika titik banjir lebih banyak sehingga kami akan mengusulkan agar anggaran untuk sarana dan prasaran ini ditambah lagi sehingga kami bisa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam menanggulangi banjir yang ada di kota ini”.

Dalam menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru BPBD Kota Pekanbaru masih kesulitan dikarena terbatasnya sarana dan prasaran yang ada di BPBD Kota Pekanbaru, ini akan berpengaruh kepada hasil dari kinerja BPBD Kota Pkenbaru khususnya dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru.

Sedangkan dari hasil observasi penulis dilapangan, peneliti menemukan ada beberapa sarana dan prasarana kerja BPBD Kota Pekanbaru tetapi masih sangat kurang, sarana dan prasarana yang ada di BPBD ada juga yang dipinjam kepada DAMKAR dan BPBD Provinsi. Sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kota Pekanbaru salah satunya Perahu Karet hanya ada tiga unit dan Water Treatment Portable hanya satu unit ini masih sangat minim sementara daerah yang terkena banjir lebih dari jumlah sarana dan prasarana tersebut hal ini sangat berpengaruh kepada kinerja BPB Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir.

b. Program kerja yang jelas

Program kerja yang jelas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program kerja dari BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru BPBD Kota Pekanbaru yaitu dengan pembuatan gorong-gorong untuk penampungan air sungai yang meluap, dan juga BPBD Kota Pekanbaru mengajak masyarakat baik dari kedinasan, swasta dan lainnya khususnya masyarakat yang berada di sekitar sungai melakukan pembersihan sungai agar air sungai tidak cepat melimpah dan ini merupakan suatu cara yang cukup baik dalam menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

Kegiatan penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Rumbai Pesisir dinilai sudah cukup baik di tandai dengan adanya program kerja pembangunan drainase untuk aliran air yang melimpah, dan dalam program kerja BPBD Kota Pekanbaru sudah merencanakan sumur serapan hanya saja belum bisa dilaksanakan karena terkendala oleh anggaran yang belum

mencukupi. Selanjutnya hasil wawancara peneliti bersama Okta Nahuwai, beliau mengatakan :

“Program kerja kami saya rasa sudah cukup baik, terutama dalam hal banjir yang ada di Kota Pekanbaru, ya program yang saya maksud seperti pembuatan gorong-gorong untuk penampungan air yang meluap, ataupun pembersihan sungai yang ada agar apabila terjadi pasang maka air sungai tidak akan cepat melimpah”.

BPBD Kota Pekanbaru sudah cukup serius dalam menanggulangi banjir yang ada di Pekanbaru, hanya saja program kerja yang sudah rencanakan memerlukan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan seluruh program yang dibuat oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir.

Sedangkan hasil observasi penulis menemukan sudah ada beberapa drainase yang dibangun, tetapi masih ada drainase yang belum selesai pengerjaannya. Sedangkan di kantor BPBD Kota Pekanbaru sudah ada program kerja yang direncanakan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Sehingga peneliti menilai bahwa program kerja dari BPBD Kota Pekanbaru sudah cukup baik, ini dilihat dari usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi banjir yang ada.

c. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat

Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam penelitian yaitu pendidikan atau pealtihan yang diberikan oleh BPBD Kota Pekanbaru terkait bagaimana cara menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru. BPBD Kota harus Pekanbaru memberikan pelatihan atau seminar kepada masyarakat bagaimana menanggulangi banjir yang ada sehingga untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada BPBD tidak sendirian dan bisa bekerja sama baik dengan

pihak swasta maupun masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan masyarakat Rumbai Pesisir khususnya. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Agustini selaku Ketua RW 02 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir mengatakan :

“Selama saya disini belum ada saya rasakan baik itu pelatihan dan pendidikan tentang banjir hanya saja ada pemberitahuan bahwasannya jangan membuang sampah kesungai itu saja yang saya tau, seharusnya BPBD atau Pemerintah Kota ini mengadakan pelatihan tentang bagaimana dan apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika banjir melanda”.

BPBD Kota Pekanbaru belum pernah mengadakan pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat terkait penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Hal ini sangat disayangkan karena pelatihan atau pendidikan juga merupakan solusi yang cukup baik dalam menanggulangi banjir. Karena apabila masyarakat sudah diberi pandangan, pelatihan atau pendidikan maka masyarakat paling tidak sudah bisa membantu BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Salah satunya masyarakat tidak lagi membuang sampah kesungai dan sungai tidak menjadi dangkal sehingga bencana banjir bisa dihindari.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPBD Kota Pekanbaru yaitu dengan Burhan Bungin, beliau mengatakan :

“Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat akan kami lakukan secepatnya tetapi sebelum itu kami harus memberikan pendidikan dahulu kepada personil kami karena ada personil yang sudah baik dalam menanggulangi banjir dan masih ada juga personil dengan kemampuannya sedikit kurang, sehingga ketika kami sudah selesai melakukan pelatihan di kantor kami setelah itu baru kami langsung terjun kemasyarakat terkait dengan pendidikan dan pelatihan dalam menanggulangi banjir tersebut”.

BPBD Kota Pekanbaru hanya baru merencanakan program pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat terkait masalah banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

Pihak BPBD terlebih dahulu merencanakan program kerja BPBD dalam menanggulangi banjir setelah itu baru akan diadakan pelatihan dan pendidikan, tetapi dalam hal ini pihak BPBD hanya akan melakukan pelatihan dahulu di Kantor BPBD Kota Pekanbaru setelah peletahan tersebut selesai maka BPBD Kota Pekanbaru baru akan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat terkait banjir tersebut.

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan dilapangan, bahwa BPBD Kota Pekanbaru belum mengadakan pelatihan baik di Kantor BPBD Kota Pekanbaru ataupun kepada masyarakat Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa bpbd Kota Pekanbaru belum pernah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dalam menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Hasil (*outcome*)

Outcomes adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program. Menurut Margaret (2002) outcome adalah respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Sementara itu NEA (2000) lebih mempertegas dengan menyebutkan perbedaan antara output dengan outcome yaitu output merupakan hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program. Output diukur dengan menggunakan istilah volume (banyaknya). Sedangkan outcome adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program. Sedangkan pengertian yang lain menyatakan bahwa perbedaan out dengan outcome sama dengan perbedaan adalah apa yang sebenarnya kita sampaikan sebagai output, dengan apa keuntungan bisnis dari output kita, sebagai outcome.

Sedangkan menurut Moehariono (2012:110) *Outcomes* yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. *Outcomes* yang dimaksud dalam penelitian yaitu dampak atau manfaat yang dihasilkan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk melihat manfaat dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator *outcomes*, yaitu :

a. Kurangnya daerah yang terkena banjir

Keberhasilan kinerja BPBD Kota Pekanbaru salah satunya bisa dilihat dari bagaimana manfaat yang dihasilkan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir dan ini bisa dilihat dari apakah sudah berkurang atau belum daerah yang terkena banjir di daerah Kota Pekanbaru. Setelah melakukan program kerja yang dilakukan oleh BPBD Kota Pekanbaru dan melaksanakan kegiatan yang sudah di programkan maka hasil kinerja BPBD adalah berkurangnya daerah yang terkena banjir. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tokoh masyarakat RT 01/RW 02 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu Umar. RK, beliau mengatakan :

“Wilayah yang terkena banjir itu-itu saja menurut saya, kalau masalah pengurangan ya ada sedikit tapi bukan pengurangan wilayah, maksudnya yang dulunya daerah itu cepat terkena banjir sekarang tidak secepat itu mungkin karena sudah adanya aliran air yang dibuat sehingga air tidak langsung menyebar ke pemukiman warga. “Saya rasa pengurangan wilayah banjir tidak ada sebab kami terkena banjir terus rasanya, BPBD saya rasa hanya membantu menanggulangi banjir aja rasanya bukan mencegah banjir itu terjadi sehingga banjir tetap terjadi disini, seharusnya BPBD juga merencanakan atau melakukan pencegahan banjir itu terjadi”.

BPBD Kota Pekanbaru belum mampu mengurangi daerah yang terkena banjir, setiap tahunnya daerah yang biasanya terkena banjir masih tetap terkena banjir artinya masyarakat belum cukup puas dengan hasil kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Dengan program kerja dan usaha yang dilakukan BPBD seharusnya BPBD sudah mampu mengurangi daerah yang terkena banjir bukan hanya membantu masyarakat apabila terjadi banjir, tetapi BPBD Kota Pekanbaru harus juga mampu mengurangi daerah yang terkena banjir, apabila itu sudah terlaksana maka untuk seterusnya akan semakin sedikit daerah yang terkena banjir di Kota Pekanbaru.

Sedangkan hasil wawancara dengan BPBD Kota Pekanbaru yaitu dengan Burhan Bungin, beliau mengatakan :

“Kalau masalah pengurangan daerah banjir memang sampai sekarang belum ada, tetapi paling tidak kami sudah berusaha semampu kami mengurangi daerah terkena banjir. Daerah yang terkena banjir semakin lama akan semakin berkurang karena usaha yang kami lakukan dan program kerja yang kami rencanakan, contohnya saja pembangunan sumur serapan yang termasuk dalam program kerja kami, kalau itu sudah siap saya rasa daerah-daerah yang terkena banjir semakin lama akan berkurang karena sudah ada tempat untuk penampungan atau pengaliran air yang melimpah tersebut”.

BPBD Kota Pekanbaru yakin mampu mengurangi daerah yang terkena banjir asalkan masyarakat dan pemerintah kota ikut membantu BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Apabila semua program kerja sudah terlaksana dengan baik secara otomatis daerah yang terkena banjir akan semakin berkurang.

Sedangkan fakta yang peneliti temukan dilapangan untuk daerah yang terkena banjir belum ada pengurangan, contohnya saja di daerah Kecamatan

Rumbai Pesisir dari dahulu sampai sekarang tetap terkena banjir, sehingga peneliti menilai bahwa BPBD Kota Pekanbaru belum mampu mengurangi daerah yang terkena banjir di Kota Pekanbaru.

b. Terbentuknya masyarakat peduli banjir

Ini merupakan sebuah nilai apakah BPBD Kota Pekanbaru sudah mampu membentuk masyarakat yang peduli banjir. Hal ini bisa terjadi apabila BPBD Kota Pekanbaru sudah melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat terkait masalah banjir tersebut sehingga masyarakat baru akan mengerti betul bagaimana cara agar banjir tidak terjadi di daerah mereka tinggal. Kepedulian masyarakat terhadap banjir merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan dibina, karena apabila sudah terbentuk masyarakat yang peduli banjir maka masyarakat akan menjaga lingkungannya masing-masing paling tidak mereka tidak akan lagi membuang sampah ke sungai yang akan menyebabkan dangkalnya dasar sungai dan akan mencegah terjadinya banjir. Menurut Agustini yang merupakan Ketua RW 02 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, beliau mengatakan :

“Ya yang sangat peduli dengan banjir ya warga yang berada disekitar sungai sini saja sementara warga yang agak jauh dari sungai ini tidak peduli sama sekali, kami sudah membersihkan daerah disekitar sungai ini tapi masih ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan membuang sampah sembarangan, kalau masalah terbentuk masyarakat peduli banjir ya sudah terbentuk tapi itu hanya warga yang berada disekitar sungai ini saja”.

Hanya beberapa orang peduli terhadap banjir yang ada di Kota Pekanbaru, dan itupun hanya masyarakat di sekitar sungai, hal ini sangat disayangkan karena seharusnya untuk menanggulangi banjir dan mencegah banjir terjadi di Pekanbaru

tidak terlepas dari masyarakat Kota Pekanbaru sendiri. Jika masyarakat tidak peduli terhadap banjir bagaimana BPBD mampu menanggulangi banjir yang ada di Pekanbaru.

Sementara itu dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa belum ada terbentuk masyarakat yang peduli terhadap banjir baik itu masyarakat disekitar sungai ataupun masyarakat yang tinggal jauh dari sungai, buktinya masih banyak masyarakat mnembuang sampah kesungai, masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga ini akan menyebabkan air sungai akan cepat melimpah dan banjir dengan mudah akan cepat terjadi.

- c. Adanya koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir

Kinerja BPBD Kota Pekanbaru bisa juga dilihat dari bagaimana pihak BPBD Kota Pekanbaru mengkoordinasikan dengan pihak Pemeirntah Kota Pekanbaru, pihak Swasta ataupun masyarakat Kota Pekanbaru. Kinerja BPBD Kota Pekanbaru akan lebih cepat berhasil apabila sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak swasta atupun dengan masyarakat karena apabila sudah bekerjasama maka akan membantu BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. BPBD Kota Pekanbaru sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberitahukan dan meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Burhan Bungin, beliau mengatakan :

“Kami melakukan koordinasi hanya kepada daerah yang terkena banjir saja tidak ke seluruh masyarakat, jadi jika ada banjir maka pihak yang terkena banjir akan langsung menghubungi kami seperti Ketua RT atau Ketua RW yang wilyahnya terkena banjir, kalau koordinasi kami sering

melakukan koordinasi secara vertical maksudnya disini, jika banjir terjadi Ketua RT akan mengkomunikasikannya kepada Ketua RW dan Ketua RW menghubungi Lurah dan Lurah bisa saja langsung menghubungi BPBD”.

Sedang hasil observasi yang peneliti temukan dilapang, BPBD Kota Pekanbaru belum melakukan koordinasi yang sebenarnya baik itu dengan pemerintah kota, swasta ataupun masyarakat. BPBD Kota Pekanbaru hanya meminta anggaran kepada pemerintah kota untuk menanggulangi banjir, dan untuk pihak swasta serta masyarakat BPBD Kota Pekanbaru belum ada melakukan koordinasi terkait penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa hanya sedikit outcomes yang dirasakan masyarakat, dan dampak dari hasil kinerja BPBD Kota Pekanbaru belum terlihat maksimal, ini bisa dilihat dari belum adanya pengurangan daerah banjir, belum terbentuknya masyarakat yang peduli banjir dan koordinasi yang tidak merata terkait penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru.

4. Manfaat (*Benefit*)

Benefit adalah bentuk imbal jasa atau dasar kebutuhan yang berguna untuk memperlancar proses kerja. Secara umum, arti benefit adalah suatu manfaat, kebaikan, guna atau faedah, kepentingan, laba atau untung, yang diperoleh oleh pihak yang berhak dari pihak lain atau dari suatu hal. Benefit yang didapatkan oleh masyarakat dari suatu organisasi bisa dalam bentuk finansial, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan hari tua, dan lain-lain. Benefit tersebut dapat diterima oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Moehariono (2012:110) benefit adalah segala sesuatu berupa

produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Benefit yang dimaksud dalam penelitian yaitu produk yang bisa dihasilkan dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru dan diraskan langsung oleh masyarakat. Untuk melihat benefit dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator benefit, yaitu :

a. Tercapainya target kerja organisasi

Pencapaian target kerja merupakan suatu ukuran bahwa program yang dikerjakan berhasil atau tidak. Dalam hal ini target yang dimaksud yaitu tercapai atau tidaknya target yang sudah direncanakan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir, sehingga ini akan menjadi nilai yang cukup menentukan apakah kinerja BPBD Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan target yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Apabila target yang sudah direncanakan BPBD Kota Pekanbaru ini berarti kinerja BPBD Kota Pekanbaru sudah baik dalam menanggulangi banjir, tetapi jika target yang sudah direncanakan oleh BPBD Kota Pekanbaru secara otomatis kinerja BPBD belum cukup baik dalam emanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru. Dari teori tersebut sebenarnya target yang ingin dicapai oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir sudah cukup baik dilihat dari sudah adanya pembangunan drainase yang merupakan target jangka pendek BPBD Kota Pekanbaru dalam emanggulangi banjir, tetapi jika hanya itu yang tercapai maka BPBD Kota Pekanbaru belum juga mampu menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru. Masih banyak target lainnya yang sampai saat ini belum bisa dicapai oleh BPBD Kota Pekabaru salah

satunya masih belum berkurangnya daerah yang terkena banjir, masih belum dilaksanakannya pembuatan sumur serapan dan masih banyak target lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Iwan Situmorang yang merupakan Kabid Kedaruratan BPBD Kota Pekanbaru mengatakan :

“Pencapaian target kami sudah membaik rasanya, contohnya saja bidang kami ya mempersiapkan logistic dan keperluan personil serta keperluan warga yang terkena banjir kami sudah mempersiapkan dengan baik, ya kalau masih ada kekurangan itu sebenarnya masih maklum karena kami juga keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, memang bisa minta bantu kepada Damkar dan Tagana tetapi kan itu juga memerlukan waktu harus memasukkan surat dulu kesana jadi kami gunakan sarana dan prasarana yang ada dulu setelah itu baru kami mengkomunikasikannya dengan pihak lainnya”.

BPBD Kota Pekanbaru hanya fokus kepada bagaimana membantu warga ketika banjir itu terjadi, seharusnya BPBD Kota Pekanbaru juga memfokuskan bagaimana pencegahan agar banjir tidak terjadi lagi, sehingga target utama itu ialah pencegahan terjadinya banjir di Kota Pekanbaru. Apabila banjir sudah dapat dicegah oleh BPBD Kota Pekanbaru secara otomatis masyarakat akan bisa merasakan hasil dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir, hasil kinerja BPBD baru akan bisa dirasakan oleh masyarakat apabila target-target yang sudah direncanakan dari awal tercapai dengan baik.

Sedangkan hasil observasi peneliti dilapangan, peneliti menemukan bahwa sudah ada beberapa target yang dicapai oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam penanggulangan banjir, paling tidak ini akan mencegah terjadinya banjir dengan cepat. Seperti pembangunan drainase disekitar daerah yang sering terkena banjir. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa target yang ingin dicapai oleh BPBD Kota Pekanbaru sudah sedikit tercapai tetapi masih belum optimal.

b. Evaluasi kekurangan dan kelebihan kinerja

Evaluasi tentang kinerja BPBD Kota Pekanbaru dilakukan agar diketahuinya apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Hal ini dilakukan agar baik pihak BPBD ataupun pihak lainnya bisa memperbaiki apa saja yang dilakukan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Masih banyak terdapat kekurangan atas kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir salah satunya koordinasi yang dilakukan BPBD tidak secara merata, sehingga hasil dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru belum maksimal, seterusnya pembagian tugas antar personil BPBD Kota Pekanbaru belum jelas. Sedangkan kelebihan dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru yaitu sudah melakukan usaha pencegahan terjadinya banjir walaupun hasilnya belum maksimal. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat RT 01/RW 02 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Peisisir yaitu Sastri, beliau mengatakan :

“Saya rasa kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam hal penanggulangan banjir masih banyak, salah satunya BPBD Kota Pekanbaru sangat lambat sampai kesini ketika terjadi banjir disini, saya tidak tau penyebabnya kenapa yang saya tau BPBD kurang sigap sehingga banyak masyarakat yang tidak terbantu apabila terjadi banjir. Kalau masalah kelebihan ya palingan sudah ada usaha-usaha yang dilakukan BPBD untuk pencegahan banjir, tetapi sayangnya banjir masih juga terjadi disini”.

Sedangkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan ada beberapa kekurangan kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru. Salah satunya masih belum jelas pembagian tugas masing-masing personil yang ada di BPBD Kota Pekanbaru, selanjutnya belum adanya sosialisasi dari BPBD kepada masyarakat terkait bagaimana cara pencegahan

banjir. Sedangkan kelebihan dari kinerja BPBD yaitu BPBD Kota Pekanbaru sudah melakukan usaha cukup maksimal dalam menanggulangi banjir, dengan dana seadanya paling tidak BPBD sudah bisa membantu masyarakat apabila bencana banjir terjadi, dan sudah ada data daerah yang sering terkena banjir di Kantor BPBD Kota Pekanbaru.

5. Dampak (*Impact*)

Impact adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian setiap indikator dalam suatu kegiatan. Pada umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Secara sederhana dapat dikatakan dampak adalah hasil dalam jangka panjang dan lebih luas efeknya.

Sedangkan menurut Moehariono (2012:110) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, dan teknologi. *Impact* yang dimaksud dalam penelitian yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam program penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat dari terbentuknya masyarakat peduli dengan lingkungan.

BPBD Kota Pekanbaru sangat mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat Kota Pekanbaru peduli dengan lingkungan sehingga penanggulangan bencana banjir yang dilakukan BPBD Kota Pekanbaru tidak sia-sia. Apabila masyarakat sudah peduli dengan lingkungan maka air tidak akan cepat melimpah

serta sampah tidak akan berserakan lagi. Tetapi untuk saat ini masih belum terlihat masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungannya masing-masing.

BPBD Kota Pekanbaru memerlukan waktu untuk menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru terutama harus melengkapi peralatan yang diperlukan dahulu untuk menanggulangi banjir, seterusnya BPBD Kota Pekanbaru sangat berharap kepada masyarakat agar menjaga lingkungan disekitar dimana mereka tinggal sehingga program dari BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir bisa berjalan dengan baik.

Sedangkan dari hasil wawancara lakukan dengan Burhan Bungin, beliau mengatakan :

“Menurut saya agar program penanggulangan banjir ini akan berhasil apabila masyarakat juga peduli dengan lingkungannya, sebesar apapun usaha yang kami lakukan kalau masyarakat tidak ikut andil bagian program penanggulangan banjir ini akan sulit berjalan. Agar program penanggulangan bencana banjir ini terlaksana dengan baik kami masih banyak memerlukan anggaran untuk memabangun drainase atau sumur serapan sehingga ada wadah untuk penampungan air dan itu memerlukan waktu yang cukup lama saya rasa. Untuk melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat harus ada anggaran operasionalnya kalau tidak ada bagaimana bisa berjalan, tapi yang terpenting kalau masyarakat sudah menanamkan peduli lingkungan di dirinya masing-masing itu juga sudah sangat memabntu kami dalam manggulangi banjir di Pekanbaru ini”.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi penulis lakukan dilapangan, masih banyak yang diperlukan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir, seperti perlengkapan sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana sudah lengkap itupun masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru ini dikarenakan banyaknya titik banjir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa BPBD Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam menanggulangi banjir tetapi masih banyak terdapat kekurangan sehingga hasil dari kinerja BPBD Kota Pekanbaru belum optimal.

C. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Bencana Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru menemui beberapa hambatan dalam menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru masih kekurangan personil dalam hal menanggulangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru. Personil dari BPBD Kota Pekanbaru dalam menanggulangi hanya 27 orang.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Pekanbaru. BPBD Kota Pekanbaru hanya memiliki motor Boat satu unit, perahu karet 3 unit dan Water Treatment Portable hanya satu set.
3. Belum terbentuknya masyarakat yang peduli dengan lingkungan masing-masing, sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori dalam penelitian ini, yakni teori kinerja dapat disimpulkan :

1. Kinerja BPBD Kota Pekanbaru dilihat dari indikator masukan (*input*) dinilai masih kurang terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan belum ada pembagian tugas dari masing-masing personil dalam menanggulangi banjir di Pekanbaru.
2. Indikator keluaran (*output*) tentang kinerja BPBD Kota Pekanbaru dinilai masih belum terlaksana dikarenakan belum ada dilakukannya pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana banjir di Kota Pekanbaru,
3. Kinerja BPBD Kota Pekanbaru dilihat dari indikator hasil (*outcomes*) dinilai masih kurang terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan belum ada pengurangan daerah yang terkena banjir dan belum dilakukannya koordinasi secara merata.
4. Indikator manfaat (*benefit*) tentang kinerja BPBD Kota Pekanbaru dinilai sudah cukup terlaksana dengan baik karena sudah ada beberapa target dari BPBD Kota Pekanbaru sudah tercapai dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pekanbaru.

5. Kinerja BPBD Kota Pekanbaru dilihat dari indikator dampak (*impact*) dinilai kurang terlaksana dengan baik karena belum adanya terbentuk masyarakat yang benar-benar peduli dengan lingkungan.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Kepada pihak BPBD Kota Pekanbaru disarankan menambah personil, sehingga ketika banjir terjadi BPBD Kota Pekanbaru tidak kekurangan personil dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan memberikan anggaran yang besar kepada BPBD Kota Pekanbaru, agar BPBD Kota Pekanbaru bisa melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pekanbaru.
3. Kepada BPBD Kota Pekanbaru disarankan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana banjir, dan melakukan pelatihan serta pendidikan sehingga terbentuk masyarakat yang peduli dengan lingkungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Huda, Ni'Matul. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Kansil, dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Keban, Jeremias. T. (2003). "Indikator Kinerja Pemerintah Daerah :Pendekatan Manajemen dan Kebijakan", Makalah, Seminar Sehari, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Lijan Poltak Sinambela. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Moehariono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ndaraha, Taliziduhu. (2003). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- _____. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- N.H.T. Siahaan. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Nurjannah, Dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prawirosentono. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

- Robbins, Stephen P. (2004). *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sedarmayanti. (2004). *Sumber Daya dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Simanjuntak, Payaman J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sobandi, Baban. (2006). *Desentralisasi dan Tuntunan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung. Humaniora.
- Steers, R. M. (2003). *Organization Effectiveness, A Behavioral View*, Good Year Publishing Company, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. 1980. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- _____. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung. Refika Aditama.
- Syafie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. rineka Cipta.
- Satori, Djam'an dan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2012. *Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar*. Bandung. Alfabeta.
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cedekia.

Dokumentasi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau